



POLICY BRIEF

DARI EVALUASI KE EKSEKUSI “Strategi Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Evaluasi LPPD”

Ditujukan Kepada

- Bupati Balangan
- Perangkat Daerah Se Kabupaten Balangan
- Kepala Bagian Pemerintahan

Disusun Oleh
Gunawan, S.Sos
Fatma Alamsyah, S.E., M.M

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi LPPD Kabupaten Balangan selama 3 tahun terakhir mendapat status kinerja “**sedang**” (2,61 – 3,40). Hal ini disebabkan oleh kompetensi tim penyusun yang masih kurang dan komitmen pimpinan dalam penyampaian laporan masih kurang, belum maksimalnya perencanaan yang berakibat pada realisasi anggaran yang tidak optimal, capaian indikator kinerja masih rendah dan tata kelola pengadaan barang/jasa yang memerlukan waktu lama, lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan ketiadaan data dukung yang sah menjadi penyebab nilai LPPD Kabupaten Balangan masih sedang. Maka berbagai permasalahan tersebut perlu segera ditemukan alternatif solusi kebijakannya. Menggunakan *Grid Analisis* terdapat empat prioritas utama yang perlu dilaksanakan dalam jangka pendek yaitu melakukan peningkatan kompetensi tim penyusun LPPD melalui pelatihan-pelatihan atau asistensi, melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK), koordinasi antar perangkat daerah baik secara vertical atau horizontal dan Penguatan perencanaan program kabupaten ke dalam dokumen perencanaan program kegiatan di setiap perangkat daerah.

PENDAHULUAN

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah merupakan fondasi utama untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berfungsi sebagai instrumen kunci dan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk menilai kinerja Pemda secara komprehensif, Selain itu LPPD merupakan salah satu bahan pembinaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Siswandi dalam Elga Tri Utama:512).

LPPD mencakup penilaian atas berbagai indikator krusial, mulai dari kualitas tata kelola pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi hak dasar masyarakat. Penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini adalah amanat konstitusional, diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya diperjelas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Mengingat LPPD dan proses evaluasinya adalah mekanisme formal utama yang menentukan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan optimal, dokumen kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah kritical dalam implementasi PP 13/2019 dan Permendagri 19/2024. Policy brief ini akan menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh Pemda dalam mencapai indikator-indikator LPPD, serta menyajikan rekomendasi kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan memperkuat tindak lanjut hasil penilaian LPPD demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang optimal.

Grafik Target Dan Capaian LPPD Tahun 2021-2023



Sumber : RPJMD Kab. Balangan Dan Kepmendagri Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2023

Tabel klasifikasi penetapan status kinerja pemerintahan daerah

Skor Kinerja	Status Kinerja
0,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Sedang
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri Nomor 19 Tahun 2024

Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan dukungan kuat dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pemerintahan masing-masing. Kinerja organisasi yang optimal berperan penting dalam mempercepat penyampaian data capaian kinerja perangkat daerah. Selain itu, kinerja yang baik memastikan pencatatan tersusun dengan sistematis, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelaporan LPPD agar menjadi akurat dan tepat waktu. Kinerja organisasi yang solid ini juga secara langsung mendukung evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memudahkan pengumpulan dan analisis data pelaksanaan kegiatan disetiap perangkat daerah secara komprehensif.

DESKRIPSI MASALAH

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) digunakan untuk mengukur secara obyektif tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dimana nilai hasil EPPD mencerminkan optimal atau tidaknya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai EPPD, semakin optimal kinerja Pemerintah Daerah begitupun sebaliknya. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara tujuan ideal ini dengan praktik di lapangan. Seringkali penetapan target hasil EPPD tidak diiringi dengan identifikasi permasalahan penghambat yang mendasar sehingga sehingga menurunkan kualitas LPPD dan melemahkan analisis sistematis dalam proses EPPD secara keseluruhan, hal ini terangkum dari beberapa informasi FGD (*Focus Group Discussion*) dan hasil reвью tim Kabupaten Balangan, tim daerah provinsi Kalimantan selatan dan tim dari Kemendagri.

“Masih ada perangkat daerah yang menyampaikan data dukung tidak sesuai format dalam petunjuk teknis penyusunan dan masih ditemukan data dukung yang tidak di lengkapi dengan kop surat dan tanda tangan pimpinan kepala daerah” (tim reвью LPPD,2023)

“Tim penyusun masih belum memahami sepenuhnya terhadap definisi operasional IKK sehingga mempengaruhi capaian IKK tersebut” (tim reвью kemendagri, 2024)

Agar dapat segera meningkatkan capaian LPPD perlu ditelaah beberapa permasalahan mendasar yang menjadi penyebab dalam upaya peningkatan nilai LPPD Kabupaten Balangan, antara lain:

- 1** Kurangnya kompetensi tim penyusun dan komitmen pimpinan dalam penyampaian laporan. Keterbatasan pemahaman teknis dalam pengumpulan data yang valid, metodologi analisis kinerja, dan pemenuhan indikator regulasi yang kompleks dan kurangnya komitmen dan *sense of urgency* dari pimpinan dalam memastikan penyampaian laporan dilakukan tepat waktu dan dengan kualitas yang tinggi.
- 2** Belum maksimalnya perencanaan yang berakibat pada realisasi anggaran yang tidak optimal. Realisasi yang tidak optimal ini dapat berupa penyerapan yang terlalu rendah (*underspending*) atau pengeluaran yang tidak sesuai target (*misspending*), Perencanaan yang terburu-buru atau tidak berbasis bukti hanya akan menghasilkan kegiatan yang tidak relevan atau sulit diimplementasikan, sehingga menghambat capaian kinerja dan memicu pemborosan sumber daya.
- 3** Capaian indikator kinerja masih rendah dan tatakelola pengadaan barang/jasa yang memerlukan waktu lama, menandakan bahwa target program dan kegiatan belum terpenuhi secara efektif. Keterlambatan pengadaan secara langsung menghambat ketersediaan sumber daya esensial, sehingga secara sistematis menggagalkan upaya pencapaian target kinerja dan memperlambat realisasi program pembangunan secara keseluruhan.
- 4** Lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan ketiadaan data dukung yang sah dan terverifikasi dalam menyampaikan laporan. Ketiadaan bukti resmi dan pengawasan yang longgar secara kolektif merusak kredibilitas laporan kinerja dan menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi yang akurat dan berbasis fakta.

menggunakan teknik kriteria alternatif dari bardach (2012) dan dunn (2003) dengan memasukkan berbagai alternatif solusi kedalam kriteria *Technical Feasibility, Economic and Financial Feasibility, Political Feasibility, dan Administrative Operability*

Matrik Alternatif Kebijakan Berdasarkan Grid Analisis

ALTERNATIF SOLUSI	Technical Feasibility (0.25)	Economic and Financial Feasibility (0.25)	Political Viability (0.25)	Administratif Operability (0.250)	Total	Prioritas Alternatif
Peningkatan kompetensi tim penyusun LPPD melalui pelatihan atau asistensi	1.83	1.67	1.79	1.63	6.92	1
Melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)	1.63	1.54	1.5	1.63	6.29	3
Koordinasi antar perangkat daerah secara vertical atau horizontal	1.63	1.5	1.54	1.58	6.25	4
Penguatan perencanaan program kabupaten ke dalam dokumen perencanaan program kegiatan di SKPD	1.58	1.63	1.54	1.63	6.38	2

Dengan menggunakan *grid analisis* berdasarkan kriteria di atas, rekomendasi kebijakan yang prioritas dilakukan adalah sebagai berikut:

1 Sebagai alternatif jangka pendek, kepala bagian pemerintahan agar segera melakukan peningkatan kompetensi tim penyusun LPPD segera dilaksanakan melalui program pelatihan analisis data dan asistensi secara intensif. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa tim mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kualitas yang berlaku dan merefleksikan secara akurat capaian kinerja masing-masing perangkat daerah. Peningkatan kompetensi ini dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan pelatihan dan asistensi, baik secara daring (online) maupun luring (tatap muka), melibatkan tim ahli dari Pemerintah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Pendekatan ini harus menggunakan metode penyampaian yang lebih mudah dipahami agar transfer pengetahuan berjalan efektif dan kualitas LPPD dapat segera ditingkatkan.

2 Penguatan dan sinkronisasi perencanaan program Kabupaten merupakan langkah esensial yang harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam dokumen perencanaan program kegiatan setiap Perangkat Daerah. Keterpaduan perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan pemerintah daerah selaras dengan program pemerintah pusat sehingga berkontribusi langsung pada prioritas pembangunan daerah, sehingga secara kolektif akan berdampak signifikan terhadap peningkatan capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan alternatif yang ada, sebaiknya pelaksanaan rekomendasi dapat dijalankan dalam dua waktu, yakni jangka pendek dan jangka menengah. Melalui rekomendasi kebijakan yang ditawarkan, harapannya agar segera di tindaklanjuti agar capaian hasil penyusunan LPPD tahun 2025 mampu meningkat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Tri Utama, Elga (2020). "Pengaruh Implementasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Tasikmalaya: Jurnal Syntax Admiration vol.1 no.5 September 2020
- Dunn, William. (2003). "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gajah Mada University Pres